

## **TINJAUAN TEORITIS MENGENAI MODEL PEMGEMBANGAN LIKUIDITAS PEREKONOMIAN DAERAH**

**Insukindro**

### **ABSTRAK**

*Dalam satu dasa warsa terakhir ini, likuiditas perekonomian Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fenomena ini nampaknya selaras dengan perkembangan konsep uang dan lembaga keuangan bank di Indonesia. Namun demikian perkembangan besaran tersebut tidak merata antar daerah, bahkan tidak mudah pula mengukurnya.*

*Tulisan ini mencoba mengetengahkan suatu pendekatan guna menaksir besarnya uang kartal yang beredar di daerah. Pendekatan yang diuraikan diharapkan dapat menjadi titik awal dari suatu usaha untuk mengukur likuiditas perekonomian daerah.*

### **Pengantar**

Selama lima tahun terakhir likuiditas perekonomian Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika pada tahun 1987/1988 likuiditas perekonomian (yang dinyatakan oleh uang dalam arti luas atau M2) mencapai Rp35,6 triliun, maka pada tahun 1995/ 1996 (Maret) telah mencapai Rp 181,382 triliun. Perkembangan ini nampaknya juga selaras dengan kebijakan moneter yang dijalankan (Kebijakan 1 Juni 1983, 27 Oktober 1988 dan kebijakan yang menyertainya) yang memungkinkan tumbuhnya jumlah dan kantor cabang bank-bank swasta nasional, walaupun akhir-akhir ini ada kecenderungan bank-bank melakukan merger. Secara umum perkembangan di atas dapat dipakai juga untuk mengukur tingkat monetisasi masyarakat Indonesia sebagai wujud dari semakin besarnya jasa perbankan yang diminati masyarakat.

Pertanyaan yang mungkin dan sering muncul adalah "*apakah perkembangan tingkat monetisasi tersebut di atas juga terjadi merata di daerah-daerah atau propensi di Indonesia?*" Banyak isu atau pendapat yang mengatakan bahwa sekitar 70

persen likuiditas masyarakat Indonesia terpusat di Jakarta. Data tahun 1993 menunjukkan bahwa dana masyarakat yang dihimpun lembaga perbankan di DKI mencapai Rp 73,690 miliar atau 62,64 persen dari seluruh dana yang dihimpun perbankan di Indonesia. Di sisi lain, dana yang disalurkan oleh perbankan (melalui kredit) di DKI tahun 1993 hanya mencapai Rp 50,982 miliar atau 50,48 persen dari seluruh kredit yang disalurkan di Indonesia. Ini memberi indikasi bahwa DKI telah menyalurkan dana ke luar DKI sebesar Rp 22,708 miliar. Nampaknya pengamatan atau analisis mengenai tingkat monetisasi dan likuiditas masyarakat di daerah perlu mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini karena rendahnya tingkat monetisasi dan likuiditas masyarakat dapat menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya kebijakan moneter di daerah tersebut. Misalnya, jika suatu daerah belum mengenal deposito berjangka, maka adanya kenaikan atau penurunan suku bunga deposito tidak akan berpengaruh terhadap perilaku permintaan deposito oleh masyarakat di daerah itu. Terlebih lagi apabila masyarakat di daerah itu hanya mengenal barter maka adanya kebijakan moneter apapun tidak akan berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam menggunakan jasa lembaga keuangan bank.

Makalah ini bermaksud mengetengahkan suatu pendekatan atau model untuk memperkirakan likuiditas perekonomian di daerah. Pendekatan atau model semacam ini (sejauh yang penulis ketahui) belum ada dalam buku literatur dan tidak mudah untuk membuatnya. Hal ini karena adanya perbedaan antara konsep daerah menurut administrasi pemerintahan dengan konsep daerah menurut pendekatan ekonomi bisnis. Yogyakarta, misalnya, menurut konsep administrasi pemerintahan mempunyai 4 kabupaten dan satu kotamadya. Namun bagi suatu kegiatan agen ekonomi, Perum Pegadaian, misalnya, Kantor Daerah Yogyakarta mencakup seluruh wilayah administrasi pemerintahan DIY dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Hal serupa sering juga terjadi untuk unit kegiatan ekonomi lain yang daerah operasi ekonomi dan bisnisnya mencakup beberapa propinsi. Dengan demikian dapat terjadi bahwa transaksi keuangan di daerah Yogyakarta belum tentu tercatat atau menggunakan jasa lembaga perbankan di propensi DIY.

Makalah ini akan dimulai dengan mengetengahkan konsep uang secara teoritis dan yang berlaku di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan membahas model atau pendekatan yang diusulkan untuk digunakan memperkirakan likuiditas perekonomian di daerah. Akhirnya uraian ditutup dengan beberapa catatan dan kesimpulan.

### **Konsep Uang: Suatu Tinjauan Kepustakaan**

Sejak barter dipakai sebagai media pertukaran, telah dikenal berbagai alat tukar seperti uang barang dan uang yang kenal saat ini. Pada umumnya perkembangan konsep uang tersebut selaras dengan perkembangan lembaga keuangan dan teori yang terkait dengan itu.

*Prof. Harry G. Johnson* (1962), misalnya, menyebutkan adanya 4 aliran utama (atau kelompok) mengenai definisi uang. Yang *pertama* adalah kelompok ekonom Klasik yang berpendapat bahwa fungsi uang yang utama adalah sebagai alat tukar. Kelompok ini mendefinisikan uang sebagai uang kartal ditambah uang giral (*demand deposit*). Yang *kedua* adalah kelompok aliran Teori Kuantitas Modern yang dimotori oleh *Prof. Milton Friedman* yang berpendapat bahwa fungsi utama uang adalah sebagai alat penyimpan daya beli sementara. Kelompok ini berpendapat bahwa uang terdiri atas uang kartal ditambah semua deposito yang ada di lembaga bank umum. Dalam pendekatan ini tentu saja uang giral dan semua deposito berjangka terliput dalam konsep uang. Yang *ketiga* adalah kelompok yang menekankan pentingnya konsep likuiditas masyarakat dalam mendefinisikan uang. Konsep likuiditas masyarakat ini dipopulerkan oleh Komite Redcliffe di Inggris. Kelompok ini menyebutkan bahwa dalam mendefinisikan uang hendaknya tidak hanya memperhatikan uang dalam arti sempit (seperti uang kartal dan uang giral), tetapi juga harus diliput semua aktiva-aktiva finansial lain yang mempunyai kemampuan sebagai substitusi dari uang. Dalam konsep ini uang harus mencakup semua besaran ekonomi yang dapat menambah likuiditas masyarakat. Kelompok *keempat* adalah kelompok yang disponsori oleh *John G. Gurley* dan *Edward L. Shaw* yang

menghendaki perlunya redefinisi uang. Menurut mereka, definisi uang yang relevan harus semua bentuk uang termasuk semua pasiva-pasiva yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank (lihat juga:Boediono, 1980 dan Insukindro, 1993)

Lebih lanjut, Partington (1989, hal. 39-49), menyebutkan bahwa di Inggris paling tidak dikenal adanya 5 konsep uang yang meliputi uang MO, M1, M2, M3, M4 dan M5 mempunyai 26 komponen. Di sisi lain, Barnett dkk (1992), dengan menggunakan konsep teori perilaku konsumen dalam menganalisis permintaan uang, menyebutkan bahwa uang M1, M2, M3 dan likuiditas di USA secara keseluruhan mempunyai 28 komponen. Gambaran sekilas ini menunjukkan bahwa perkembangan definisi tersebut seiring dengan perkembangan teori lembaga keuangan dan lembaga keuangan itu sendiri dan juga adanya perkembangan media pertukaran yang diproduksi oleh sistem perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

### Konsep Uang Beredar di Indonesia dan Perkembangannya

Bila diamati laporan bulanan atau tahunan dan informasi dari Kantor Statistik Bank Indonesia, maka akan dapat diketahui bahwa di Indonesia dikenal 3 konsep uang yaitu uang primer atau MO (*reserve money*), uang dalam arti sempit atau M1 dan uang dalam arti luas atau M2.

**Tabel 1**  
**Sumber-Sumber dan Penggunaan Uang Primer di Indonesia**  
**Neraca Konsolidasi Otoritas Moneter**

Sumber-Sumber	Penggunaan
1. Luar Negeri - Cadangan Internasional (C1)	1. Uang Kartal yang ada di masyarakat (CP)
2. Dalam Negeri - Tagihan Bersih Sektor Pemerintah (TBSP) - Tagihan pada BPUG (TB) - Tagihan pada perusahaan dan perorangan (TPP)	2. Saldo giro perusahaan dan perorangan (SGP)
3. Sumber-sumber lain (SL)	3. Kas BPUG (KB)
	4. Saldo Giro BPUG (SGB)

Sumber : Bank Indonesia (1993), **Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia**, diolah dan Insukindro (1993)

Uang primer merupakan kewajiban moneter dari otoritas moneter dan terdiri atas uang kartal yang berada di luar Bank Indonesia dan Kas Negara, dan rekening giro Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) dan sektor swasta di Bank Indonesia (lihat Tabel 1). Ini berarti bahwa uang kartal yang dipegang oleh pemerintah (kas pemerintah atau kas negara) dan simpanan giral pemerintah yang ada di otoritas moneter (Bank Indonesia) tidak diperhitungkan sebagai komponen penggunaan uang primer. Hal itu dapat terjadi karena likuiditas yang dimiliki oleh pemerintah terutama berasal dari kegiatan fiskal. Di sisi lain likuiditas masyarakat diperhitungkan dalam uang primer karena likuiditas tersebut diperoleh melalui transaksi dan merupakan pasiva otoritas moneter. Memang harus diakui bahwa kegiatan-kegiatan sektor pemerintah mempunyai dampak moneter terhadap perekonomian dalam negeri (lihat juga: *Departemen Keuangan, 1990 dan Insukindro et al, 1992*).

Uang beredar dalam arti sempit atau M1 atau *narrow money* adalah kewajiban moneter sistem moneter kepada sektor swasta domestik, dan terdiri atas uang kartal yang dipegang masyarakat atau uang yang ada di luar Bank Indonesia dan Kas Negara ditambah uang giral (lihat Tabel 2). Secara umum yang dimaksud dengan uang kartal adalah uang kertas dan uang logam dalam negeri yang berlaku dan dikeluarkan oleh otoritas moneter berdasarkan undang-undang (dalam hal ini UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral). Uang kertas adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan berdasarkan undang-undang merupakan alat pembayaran yang sah. Uang logam adalah uang yang juga dikeluarkan oleh Bank Indonesia, namun jumlahnya relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan uang kertas. Berdasarkan pengertian tersebut, maka uang kertas dan logam yang telah dinyatakan tidak berlaku dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai komponen uang kartal, karena mereka tidak lagi menjadi kewajiban moneter dari sistem moneter di Indonesia. Demikian pula uang kertas dan uang logam asing tidak dapat dipandang sebagai uang kartal. Hal ini karena kedua uang tersebut bukanlah merupakan kewajiban moneter dari sistem moneter di Indonesia dan bukanlah uang yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah.

**Tabel 2**  
**Komponen Neraca Konsolidasi Sistem Moneter Indonesia**

<b>Aktiva:</b>	
1.	Aktiva Luar Negeri (ALN)
2.	Tagihan Bersih Sektor Pemerintah (TBSP)
2.1.	Pemerintah Pusat
2.2.	Lembaga dan Perusahaan Pemerintah
3.	Tagihan pada Perusahaan dan Perorangan (TPP)
3.1.	Pinjaman
3.2.	Tagihan lainnya
4.	Aktiva lainnya (AL)
<b>Pasiva:</b>	
1.	Pasiva Luar Negeri (PLN)
2.	Uang dalam arti sempit (M1)
2.1.	Uang kartal yang dipegang oleh masyarakat (CP)
2.2.	Uang giral (DD)
3.	Uang kuasi (QM)
3.1.	Tabungan dan Deposito berjangka dalam rupiah (TD)
3.2.	Deposito berjangka dalam valuta asing (DVA)
4.	Pasiva lainnya (PL)
4.1.	Modal
4.2.	Lainnya

Sumber: lihat Tabel 1

Uang giral adalah simpanan atau saldo rekening pada bank-bank pencipta uang giral (BPUG) yang setiap saat dapat ditarik oleh pemiliknya guna ditukarkan dengan uang kartal sebesar nominal yang diinginkan oleh pemiliknya tanpa dikenakan denda. Dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, uang giral terdiri atas rekening koran dalam rupiah tnilik penduduk Indonesia, pengiriman uang serta deposito berjangka dan tabungan yang telah jatuh tempo.

Secara umum berdasarkan konsep uang tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian uang beredar dalam arti sempit (M1) adalah (a) uang kartal dan saldo rekening koran pemerintah pada Bank Indonesia (termasuk yang ada di Kas Negara) dan bank-bank umum; (b) cadangan resmi pemerintah dan bank sentral asing; (c) kas Bank Indonesia dan bank-bank umum; dan

(d) saldo rekening koran bank-bank umum pada Bank Indonesia dan bank-bank umum lainnya.

Uang dalam arti luas atau uang M2 atau broad money adalah kewajiban moneter sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri atas uang M1 ditambah uang kuasi (quasi money). Uang kuasi merupakan aktiva milik sektor swasta domestik dalam neraca sistem moneter yang dapat memenuhi sebagian fungsi uang. Ini berarti uang kuasi merupakan uang yang untuk sementara kehilangan fungsinya sebagai media pertukaran atau uang yang tidak seluruhnya likuid. Dengan demikian dalam konsep ini uang kuasi akan dapat berfungsi sebagai media transaksi jika ia terlebih dulu dikonversikan menjadi uang kartal atau uang giral. Menurut laporan Bank Indonesia, uang kuasi terdiri atas tabungan dan deposito berjangka (termasuk sertifikat deposito) baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing, serta rekening dalam valuta asing. Dalam sistem moneter Indonesia, uang beredar M2 sering disebut juga sebagai *likuiditas perekonomian*. Di samping itu masih dikenal pula konsep likuiditas total masyarakat yang meliputi uang kartal, uang giral, deposito berjangka, tabungan, obligasi jangka pendek, *banker's acceptances*, surat-surat berharga, simpanan di luar negeri dan lain sebagainya.

Perkembangan sepintas mengenai uang beredar di Indonesia selama sembilan tahun terakhir dapat di lihat pada Tabel 3. Nampak bahwa uang kartal mempunyai perkembangan yang relatif stabil dengan laju pertumbuhan rata-rata selama sembilan tahun terakhir sebesar 16,43 persen. Di sisi lain uang kuasi dan uang M2 mempunyai laju pertumbuhan yang relatif tinggi (di atas 20 persen) yaitu masing-masing sebesar 27,62 dan 23,90 persen. Perkembangan yang relatif tinggi ini, khususnya untuk uang kuasi dan uang M2, terjadi setelah Pakto 1988 telah mendorong lembaga keuangan untuk menciptakan produk-produk baru dan kemudahan-kemudahan yang dengan sendirinya dapat meningkatkan likuiditas perekonomian.

**Tabel 3**  
**Uang Beredar di Indonesia, 1987-1995 (Miliar Rupiah)**

Akhir Periode	Uang Kartal	Uang Giral	M1	Uang Kuasi	M2
1987	5.782	6.903	12.685	21.000	33.885
1988	6.246	8.146	14.392	27.606	41.998
1989	7.426	12.688	20.144	38.591	58.705
1990	9.094	14.725	23.819	60.811	84.630
1991	9.346	16.996	26.342	72.717	99.059
1992	11.478	17.301	28.779	90.274	119.053
1993	14.431	22.605	37.036	108.563	145.599
1994	18.637	26.985	45.622	128.697	174.319
1995 *)	18.905	26.229	45.134	136.248	181.382

\*) Maret

Sumber : Bank Indonesia, **Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia**, beberapa terbitan.

### Uang Beredar dan Komponen yang Mempengaruhinya

Seperti telah disebutkan di atas, di samping uang primer MO, di Indonesia dikenal juga uang M1 atau sering hanya dikatakan sebagai "uang beredar" dan uang M2 yang mencerminkan juga "likuiditas dalam perekonomian". Perilaku uang M1 dan M2 di Indonesia dapat pula diamati melalui neraca konsolidasi sistem moneter. Neraca tersebut pada dasarnya merupakan gabungan dari neraca konsolidasi otoritas moneter dan bank-bank pencipta uang giral.

Secara umum neraca konsolidasi sistem moneter menggambarkan: (a) kewajiban moneter sistem moneter kepada sektor swasta di dalam negeri, yang terdiri atas uang kartal, uang giral dan uang kuasi, dan (b) faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar di Indonesia.

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa berdasarkan identitas akuntansi (total aktiva sama dengan total pasiva), maka akan diperoleh hubungan sebagai berikut;

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & ALN + TBSP + TPP + AL \\
 & = PLN + M1 + QM + PL (ALN - PLN) + \\
 & \quad TBSP + TPP + (AL - PL) \\
 & = M1 + QM
 \end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned}
 (2) \quad M2 & = M1 + QM \\
 & = CI + TBSP + TPP + ALB
 \end{aligned}$$



Di mana CI adalah cadangan internasional atau aktivaluar negeri bersih dan ALB merupakan aktiva bersih lainnya.

Kemudian, dari identitas (2) atau Tabel 2 akan dapat diketahui komponen atau sektor ekonomi apa saja yang dapat mempengaruhi uang beredar ( $m_1$ ) dan likuiditas masyarakat.

Menurut Bank Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi uang beredar di Indonesia adalah: (1) aktiva luar negeri bersih (ALN), (2) tagihan bersih pada pemerintah pusat (TBPP), (3) tagihan pada lembaga dan perusahaan pemerintah (TLPP), (4) tagihan pada perusahaan swasta dan perorangan (TPP), dan (5) faktor-faktor lainnya bersih (LB) termasuk jaminan impor.

Seperti telah dijelaskan pada identitas (1) dan (2) pada dasarnya aktiva luar negeri bersih merupakan selisih antara aktiva dan pasiva luar negeri, dan menunjukkan pengaruh sektor luar negeri terhadap sistem moneter di Indonesia. Aktiva luar negeri meliputi semua tagihan kepada masyarakat luar negeri (bukan penduduk Indonesia) tanpa memperhatikan jenis dan bentuk tagihan, tingkat likuiditas tagihan, jenis mata uang (dalam valuta asing atau rupiah) dan jangka waktu tagihan. Hal serupa juga untuk pasiva luar negeri yang merupakan kewajiban kepada bukan penduduk Indonesia tanpa memperhatikan faktor-faktor seperti halnya pada aktiva luar negeri.

Tagihan bersih pada pemerintah merupakan selisih antara tagihan kepada pemerintah dan rekening pemerintah. Rekening tagihan kepada pemerintah atau rekening pinjaman pemerintah mencatat semua tagihan Bank Indonesia kepada pemerintah yang timbul sebagai akibat adanya pemberian uang muka oleh Bank Indonesia kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan lain baik dalam rangka pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun di luar APBN. Rekening Giro Pemerintah atau rekening pemerintah mencatat dana pemerintah pusat yang dikelola oleh Bank Indonesia (lihat: *Departemen Keuangan, 1990; Insukindro et al, 1992; Insukindro, 1993*). Tagihan kepada lembaga dan perusahaan pemerintah, swasta dan perorangan merupakan

pinjaman yang diberikan kepada sektor-sektor tersebut baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing tanpa memperhatikan jangka waktu pinjaman.

### **Model Penaksir Likuiditas Perekonomian Daerah**

Sejauh ini telah dikemukakan konsep uang dan likuiditas masyarakat baik secara teoritis dan berlaku di negara maju maupun yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya seperti yang ingin dicapai dalam makalah ini tiba saatnya bagi kita untuk mengamati likuiditas perekonomian di daerah. Tentu saja sebagai bagian dari negara kesatuan, yang dimaksud dengan likuiditas perekonomian di sini adalah likuiditas masyarakat seperti definisi di atas, yaitu uang dalam arti luas atau M2.

Bila di tingkat nasional kita ingin mengamati perilaku uang M2, maka sumber utama yang dapat dituju adalah Bank Indonesia baik melalui laporan bulan maupun mingguannya. Informasi serupa tentunya diharapkan diperoleh bila ingin diketahui likuiditas masyarakat di suatu daerah, propinsi atau kabupaten. Namun harapan ini menjadi putus karena laporan Bank Indonesia di daerah nampaknya belum mampu menyajikan data yang diinginkan, terutama data uang kartal sebagai komponen M1 dan M2. Hal ini dapat dimaklumi karena tidak semua transaksi ekonomi yang menggunakan uang tercatat di sistem perbankan di daerah itu. Misalnya saja, uang kartal yang dibawa dengan angkutan darat, udara atau laut masuk ke daerah dan kemudian di simpan di kas masing-masing agen ekonomi. Demikian juga dapat terjadi transaksi ekonomi dan keuangan dilakukan di Jakarta sedangkan kegiatan ekonomi bisnis terjadi di kota atau propinsi di luar DKI. Selain itu bagaimana peranan kantor pos atau lembaga ekonomi keuangan dalam mempengaruhi uang beredar di suatu wilayah. Pertanyaan juga dapat dilanjutkan, misalnya, *"apakah Pemerintah Daerah dengan APBD dan kas milik Pemerintah Daerah di Bank Pembangunan Daerah dapat diperlakukan seperti kas pemerintah di Bank Indonesia ?"*. Oleh karena itu perlu dicarikan pendekatan atau model agar diperoleh suatu proksi terhadap jumlah uang kartal, M1 dan M2.

Suatu pendekatan pertama, walaupun belum dapat mencerminkan keadaan sebenarnya, adalah dengan mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh lembaga ekonomi bank dan bukan bank yang dapat menyebabkan uang masuk ke dan keluar dari suatu daerah. Misalnya, mencatat semua kiriman uang masuk ke dan keluar dari daerah yang dilakukan oleh lembaga bank (termasuk kantor perbendaharaan negara), lembaga keuangan bukan bank, kantor pos, lembaga jasa angkutan/pengiriman dan kegiatan lainnya. Data yang diperoleh kemudian dipakai sebagai proksi untuk menentukan perkiraan jumlah uang kartal di suatu daerah.

Pendekatan kedua yang dapat pula dilakukan adalah mengharapakan kepada "*sistem moneter*" (bank-bank umum dan BI cabang) di daerah membuat neraca perkiraan seperti pada Tabel 2. Kemudian dengan memperhatikan prakiraan uang kartal dalam laporan itu, dan laporan uang kartal yang masuk ke dan keluar daerah tersebut dari kantor pos dan lembaga ekonomi lainnya, BI cabang di daerah itu memperkirakan jumlah uang kartal di daerah yang bersangkutan. Diharapkan dengan diketahui uang kartal akan dapat diketahui pula likuiditas perekonomian daerah tersebut.

Pendekatan lain yang mungkin dapat digunakan adalah pendekatan berdasarkan Teori Kuantitas Sederhana dari kelompok Cambridge sebagai berikut:

$$(3) M = k Y \text{ atau } M = k P y$$

di mana M adalah jumlah uang beredar, Y merupakan pendapatan nominal, P adalah harga dan y merupakan pendapatan riil serta k adalah kecepatan peredaran uang.

Selanjutnya selaras dengan konsep yang dikembangkan oleh kelompok Klasik, di sini dianggap bahwa k adalah tetap untuk jangka pendek dan berlaku sama untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian untuk mencari jumlah uang M1 di daerah, misalnya, dapat didekati dengan cara sebagai berikut:

$$(4) M1(di) = M1 \frac{Y(di)}{Y}$$

di mana  $M(di)$  adalah jumlah uang M1 di daerah  $i$ ,  $Y(di)$  merupakan Pendapatan atau Produksi Regional Bruto daerah  $i$ ,  $M1$  adalah jumlah uang beredar M1 di Indonesia dan  $Y$  adalah Pendapatan atau Produksi Nasional Bruto.

Penggunaan Produksi Regional atau Nasional diharapkan dapat mencerminkan daya beli masyarakat dan kegiatan ekonomi daerah yang bersangkutan. Tentu saja pernyataan ini didasarkan pada anggapan bahwa semakin tinggi PDRB akan menunjukkan semakin majunya suatu daerah dan dengan demikian semakin besar pula kegiatan ekonomi dan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah itu baik melalui jasa perbankan maupun non-bank.

## Penutup

Makalah ini telah mengemukakan konsep likuiditas perekonomian baik secara konseptual dan banyak diterapkan di negara maju maupun konsep yang berlaku di Indonesia. Likuiditas perekonomian di Indonesia secara konseptual merupakan uang beredar dalam arti luas atau uang M2. Konsep ini mungkin pada suatu saat akan berubah menjadi M3 atau M4 selaras dengan perkembangan sistem dan jasa serta produk yang ditawarkan oleh sistem perbankan di Indonesia.

Likuiditas perekonomian daerah telah pula dibahas, namun harus diakui bahwa mengukur besaran likuiditas di daerah bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena kompleksitasnya jauh lebih besar dan sulitnya mengukur cakupan daerah berdasarkan kegiatan ekonomi bisnis dari agen ekonomi. Dalam makalah ini telah diusulkan berbagai pendekatan guna memperoleh proksi uang kartal yang masih merupakan besaran yang sampai saat ini belum mampu diketahui jumlah peredarannya di daerah. Uang giral, deposito dan tabungan lain masih mungkin ditelusuri dari bank-bank penyelenggara, sehingga bila uang kartal dapat diperkirakan jumlahnya berarti likuiditas perekonomian daerah dapat diperkirakan pula jumlah.

**Kepustakaan**

Barnett, W.A., D. Fisher and A. Serletis (1992), "*Consumer Theory and the Demand for Money*", **Journal of Economic Literature**, 30, hal. 2086-2119.

Boediono (1990), **Teori Moneter**, BPFE Yogyakarta.

Departemen Keuangan R. I (1990), **Laporan Penelitian Sistem Keuangan dan Mekanisme Keuangan antara Departemen Keuangan dan Bank Indonesia**, 31 Maret.

Insukindro (1993), **Ekonomi Uang dan Bank: Teori dan Pengalaman di Indonesia**, BPFE Yogyakarta.

Insukindro, Nopirin, M. Kuncoro dan E. Purnawan (1992), **Analisa Dampak Sektor Pemerintah Pusat Terhadap Perekonomian Nasional**, PPE Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.

Johnson, H-G. (1962), "*Monetary Theory and Policy*", **American Economic Review**, 52.

Partington, I (1989), **Applied Economics in Banking and Finance**, Oxford University Press.